

PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM STABILITAS SOSIAL DAN MORAL PERSPEKTIF FUNGSIONALISME PARSONS

Imroatus Sholekah

Universitas Kiai Abdullah Faqih

Imroatussholekah07@gmail.com

Maftuh

Universitas Kiai Abdullah Faqih

maftuh10@gmail.com

Abstrak

Lemaga pendidikan Islam memiliki peran strategis sebagai institusi sosial dalam menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat. Di tengah dinamika perubahan sosial yang kompleks, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media sosialisasi nilai, norma, dan etika keagamaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan Islam dalam menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat melalui perspektif teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap berbagai literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan Islam menjalankan fungsi adaptasi, integrasi, pencapaian tujuan, serta pemeliharaan pola nilai moral sebagaimana tercermin dalam skema AGIL. Melalui fungsi-fungsi tersebut, pendidikan Islam berkontribusi dalam menciptakan keteraturan, keseimbangan, dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.

Kata kunci : pendidikan Islam, stabilitas sosial, moral masyarakat, fungsionalisme struktural, Talcott Parsons

Abstract

Islamic educational play a strategic role as social institutions in maintaining social and moral stability within society. Amid increasingly complex social changes, Islamic education functions not only as a means of knowledge transmission but also as a medium for the socialization of values, norms, and religious ethics. This article aims to analyze the role of Islamic educational institutions in maintaining social and moral stability through the perspective of Talcott Parsons' structural functionalism theory. This study employs a library research method with a descriptive-analytical approach by examining relevant literature. The findings indicate that Islamic educational institutions perform functions of adaptation, goal attainment, integration, and pattern maintenance as conceptualized in the AGIL framework. Through these functions, Islamic education contributes to social order, balance, and the sustainability of moral values in society.

Keywords : Islamic education, social stability, public morality, structural functionalism, Talcott Parsons

PENDAHULUAN

Leemba Pendidikan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan dan stabilitas kehidupan masyarakat. Melalui pendidikan, nilai-nilai, norma, dan pola perilaku sosial ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks masyarakat yang terus mengalami perubahan sosial, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan karakter, moral, dan integrasi sosial (Azmi, 2025). Oleh karena itu, keberadaan lembaga pendidikan menjadi sangat penting dalam menjaga keteraturan dan keseimbangan sosial.

Lembaga pendidikan Islam, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan sistem sosial masyarakat, memiliki kekhasan tersendiri dalam menjalankan fungsi sosial tersebut. Selain memberikan pengetahuan akademik, lembaga pendidikan Islam menanamkan nilai-nilai keagamaan yang berorientasi pada pembentukan moral individu dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, kepedulian sosial, serta kepatuhan terhadap norma agama dan sosial diajarkan secara sistematis melalui kurikulum maupun praktik keseharian (Bafadhol, 2017). Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam tidak hanya berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga dalam menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat.

Dalam kajian sosiologi pendidikan, peran pendidikan sebagai institusi sosial dapat dianalisis melalui berbagai perspektif teoretis, salah satunya adalah teori fungsionalisme struktural (Binti Maunah, 2022). Teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang tersusun atas bagian-bagian atau struktur yang saling bergantung dan bekerja sama untuk menjaga keseimbangan sosial. Salah satu tokoh utama dalam teori fungsionalisme struktural adalah Talcott Parsons, yang melihat pendidikan sebagai mekanisme penting dalam proses sosialisasi dan integrasi sosial (Zaidan et al., 2025).

Parsons menjelaskan bahwa keberlangsungan suatu sistem sosial ditentukan oleh kemampuan struktur-struktur sosial dalam menjalankan fungsi-fungsi dasar yang diperlukan. Melalui skema AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency), Parsons menegaskan bahwa setiap institusi sosial, termasuk pendidikan, memiliki peran spesifik dalam menjaga stabilitas dan keteraturan masyarakat. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan Islam dapat dipahami sebagai institusi yang berperan dalam pemeliharaan nilai (latency), integrasi

sosial, serta pembentukan orientasi moral individu agar selaras dengan tujuan sosial yang lebih luas (Agustina, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga pendidikan Islam dalam menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat dengan menggunakan perspektif teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoretis mengenai fungsi sosial pendidikan Islam serta kontribusinya dalam membangun masyarakat yang stabil, harmonis, dan bermoral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang bersifat konseptual-teoretis. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah secara mendalam Teori Fungsionalisme dan ajaran-ajaran Pendidikan Islam yang berkaitan dengan pembentukan solidaritas sosial tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder, seperti buku Pendidikan Islam, Teori Fungsionalisme, solidaritas sosial, kitab-kitab keislaman, serta artikel jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis isi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Fungsionalisme struktural merupakan salah satu teori dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang tersusun atas bagian-bagian atau struktur yang saling berkaitan dan saling bergantung satu sama lain (Akhmad Rizqi Turama, 2020). Setiap struktur sosial memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi terhadap keberlangsungan, keteraturan, dan keseimbangan sistem sosial secara keseluruhan. Apabila salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik, maka akan memengaruhi stabilitas masyarakat secara umum (Adibah, 2017).

Dalam perspektif ini, masyarakat dipahami sebagai suatu sistem yang cenderung mencari keseimbangan. Keteraturan sosial tercipta melalui kesepakatan bersama atas nilai dan norma yang berlaku, yang kemudian disosialisasikan melalui lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, agama, dan pendidikan. Dengan demikian, perubahan sosial dipandang sebagai proses yang berlangsung secara adaptif (Sayono, 2024).

Secara historis, fungsionalisme struktural berkembang dari pemikiran para tokoh sosiologi klasik. Auguste Comte dianggap sebagai perintis dengan gagasannya tentang masyarakat sebagai organisme sosial. Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Émile Durkheim, yang menekankan pentingnya solidaritas sosial, baik solidaritas mekanik maupun organik, serta fungsi institusi sosial dalam menjaga kohesi masyarakat. Selanjutnya, Herbert Spencer turut memperkuat pendekatan ini dengan analogi masyarakat sebagai sistem biologis yang terdiri atas bagian-bagian yang memiliki fungsi berbeda (Razak, 2024).

Secara esensial, teori ini berpandangan bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan yang tersusun atas elemen-elemen yang saling terkait dan bergantung, di mana setiap elemen memiliki fungsi penting dalam menjaga integrasi, keseimbangan, serta keberlangsungan masyarakat, dengan perubahan sosial dipandang sebagai fenomena yang jarang terjadi namun berpotensi membawa manfaat (Niko & Yulasteriyani, 2020).

Perkembangan fungsionalisme struktural mencapai bentuk sistematisnya melalui pemikiran Talcott Parsons (Wijaya & Nasution, 2023). Pada abad ke-20 Parsons mengembangkan teori fungsionalisme struktural secara sistematis. Ia memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang senantiasa berupaya mencapai keseimbangan (equilibrium). Menurutnya, keberlangsungan suatu sistem sosial ditentukan oleh kemampuan struktur-struktur sosial dalam menjalankan fungsi-fungsi dasar yang diperlukan. Untuk menjelaskan hal tersebut, Parsons merumuskan skema AGIL, yaitu *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency* (Agustina, 2019). Jika empat unsur ini terpenuhi maka sistem sosial dapat bertahan dan berjalan secara stabil. Skema AGIL inilah yang menjadi kerangka analitis utama dalam memahami bagaimana suatu sistem sosial bekerja, sehingga perlu dijelaskan lebih lanjut makna dan fungsi dari masing-masing unsur tersebut (Kurniawan et al., 2023).

a) *Adaption*

Adaption (adaptasi) adalah kemampuan sistem dalam berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sistem sosial harus berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Baik secara internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan agar sistem sosial dapat bertahan. Adaptasi ini mencakup segala hal seperti mengumpulkan sumber-sumber kehidupan, komoditas dan redistribusi sosial.

b) *Goal attainment*

Goal attainment (Pencapaian tujuan) merupakan imperatif yang mengatur tujuan-tujuan masa mendatang dan mengupayakan cara untuk mencapainya. Dalam setiap

sistem sosial selalu terdapat visi dan misi atau tujuan bersama yang hendak diwujudkan. Konsep *Goal Attainment* merujuk pada tujuan utama yang harus dicapai oleh sistem sosial melalui keterlibatan aktif seluruh individu yang berada di dalamnya.

c) *Integration*

Artinya, suatu sistem dituntut untuk mampu mengatur serta mengelola hubungan antarkomponen yang ada di dalamnya. Sistem yang terintegrasi dengan baik pada umumnya memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kondisi keseimbangan. Fungsi integrasi adalah menyatukan keseluruhan anggota sistem sosial setelah adanya kesepakatan bersama tentang nilai-nilai sosial. Kemudian nilai-nilai dan norma inilah yang berperan penting dalam menjaga keutuhan anggota sistem sosial.

d) *Latency*

Merupakan pemeliharaan pola dalam hal menjaga nilai-nilai sosial, budaya, bahasa, norma, aturan dan sebagainya agar tetap hidup dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lama (Nikmah, 2025).

Lemaga Pendidikan Islam sebagai Institusi Sosial

Lembaga pendidikan Islam merupakan institusi sosial yang berfungsi sebagai wahana sosialisasi nilai, norma, dan moral keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan sendiri adalah fenomena sosial yang berlangsung dalam konteks interaksi antarindividu. Hal ini disebabkan karena proses pendidikan tidak terlepas dari hubungan timbal balik dan saling memengaruhi antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (Wahyuni et al., 2021). Dalam kondisi tersebut, istilah pendidik dan peserta didik dipahami sebagai dua konsep yang ditinjau berdasarkan kedudukannya dalam interaksi sosial. Hal ini berkaitan dengan pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap perilaku serta peran utama dalam proses perubahan perilaku tersebut (Awwaliyah & Rofi'ah, 2021). Oleh karena itu, dalam praktiknya proses pendidikan sering kali sulit menetapkan secara permanen siapa yang berperan sebagai pendidik dan siapa sebagai peserta didik, karena keduanya dapat saling bertukar fungsi dan posisi.

Pendidikan Islam pada dasarnya mengandung ajaran dan praktik yang secara tegas mendorong terbentuknya solidaritas sosial dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Hal ini tercermin dari penekanan pada nilai *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan), pentingnya *ta'awun* (tolong-menolong), prinsip kesetaraan manusia di hadapan Tuhan, serta kepedulian terhadap sesama (Juwita et al., 2020). Selain itu, kegiatan kolektif dan kurikulum yang memuat nilai-nilai sosial memiliki peran penting dalam menanamkan sikap tersebut. Nilai-nilai ini tidak

hanya disampaikan secara teoritis melalui mata pelajaran seperti Akhlak, Fikih Sosial, dan Sejarah Kebudayaan Islam, tetapi juga diwujudkan dalam praktik keseharian di lembaga pendidikan Islam melalui berbagai aktivitas sosial dan keagamaan (Zaidan et al., 2025).

Peran Lembaga Pendidikan Islam dalam Menjaga Stabilitas Sosial dan Moral

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons, pendidikan Islam berfungsi sebagai sarana utama sosialisasi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah dan pesantren, memiliki peran strategis dalam mentransmisikan nilai-nilai keislaman kepada peserta didik, baik melalui proses pembelajaran formal maupun melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari (Akhmad Rizqi Turama, 2020). Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap norma agama diajarkan secara sistematis sebagai bagian dari pembentukan kepribadian individu.

Dalam perspektif skema AGIL, fungsi sosialisasi nilai dan norma ini berkaitan erat dengan fungsi *latency* atau *pattern maintenance*, yaitu pemeliharaan pola-pola nilai yang menjadi fondasi sistem sosial. Pendidikan Islam berperan menjaga kesinambungan nilai moral dari satu generasi ke generasi berikutnya. Apabila fungsi ini berjalan dengan baik, maka sistem sosial akan cenderung stabil karena individu-individu di dalamnya memiliki orientasi nilai yang relatif seragam dan selaras dengan norma yang berlaku (Awwaliyah & Rofi'ah, 2021).

Lebih jauh, sosialisasi nilai melalui pendidikan Islam juga berkontribusi pada fungsi *adaptation* dalam sistem sosial. Peserta didik dibekali kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai moral dasar (Sayono, 2024). Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam berfungsi sebagai penyeimbang antara tuntutan modernisasi dan pelestarian nilai-nilai keagamaan, yang pada akhirnya mendukung terciptanya stabilitas sosial secara berkelanjutan.

Selain berfungsi sebagai agen sosialisasi, lembaga pendidikan Islam juga berperan penting dalam menciptakan integrasi sosial. Pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek individual, tetapi juga membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya hidup bermasyarakat secara harmonis. Melalui penanaman nilai ukhuwah, toleransi, dan tanggung jawab sosial, lembaga pendidikan Islam membantu menyatukan individu-individu ke dalam tatanan sosial yang terintegrasi (Rahmah et al., 2024).

Dalam konteks teori Parsons, fungsi ini berkaitan dengan unsur *integration* dalam skema AGIL, yaitu kemampuan sistem sosial untuk mengatur hubungan antarbagian agar tidak

menimbulkan konflik yang dapat mengganggu keseimbangan sosial (Darwis et al., 2025). Melalui penanaman nilai ukhuwah, toleransi, dan sikap saling menghormati, lembaga pendidikan Islam membantu meminimalkan potensi disintegrasi sosial. Peserta didik didorong untuk memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat, sehingga mampu berkontribusi secara positif dalam kehidupan sosial (Komalasari, 2021).

Pembentukan moral masyarakat melalui pendidikan Islam juga berhubungan dengan fungsi *goal attainment*, yakni pencapaian tujuan sistem sosial. Salah satu tujuan utama masyarakat adalah terciptanya keteraturan dan keharmonisan sosial. Pendidikan Islam, dengan orientasi moral dan spiritualnya, berkontribusi pada pencapaian tujuan tersebut dengan membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral. Individu dengan moral yang kuat cenderung mematuhi norma sosial, menghargai hukum, serta menjaga hubungan sosial yang sehat (Rahmah et al., 2024).

Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam dapat dipahami sebagai institusi sosial yang memiliki peran ganda, yaitu membentuk moral individu sekaligus menjaga stabilitas sosial masyarakat. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, peran ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan, keteraturan, dan keberlangsungan masyarakat secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Lembaga pendidikan Islam merupakan institusi sosial yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat. Melalui perspektif teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, lembaga pendidikan Islam dapat dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang menjalankan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola nilai sebagaimana dirumuskan dalam skema AGIL. Fungsi-fungsi tersebut tercermin dalam proses sosialisasi nilai dan norma, pembentukan moral individu, serta penguatan integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme pemeliharaan keteraturan dan keseimbangan sosial. Dengan menanamkan nilai-nilai moral dan etika sosial, lembaga pendidikan Islam berkontribusi dalam membentuk individu yang berkarakter dan bertanggung jawab secara sosial. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam dapat dipandang

sebagai pilar penting dalam menjaga keberlangsungan stabilitas sosial dan moral masyarakat di tengah dinamika perubahan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, I. Z. (2017). Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga. *INSPIRASI (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)*, 1(2), 171. <https://doi.org/10.61689/inspirasi.v1i2.12>
- Agustina, N. Iaras. (2019). Pengantar Teori-Teori Sosial. In *Yayasa Pustaka Obor Indoinesia Indonesi*.
- Akhmad Rizqi Turama. (2020). Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. *Journal Systems UNPM (Universitas Pamulung)*, 58–69.
- Awwaliyah, N., & Rofi'ah, S. (2021). *MADRASAH SEBAGAI SISTEM SOSIAL PERSPEKTIF TALCOTT PARSONS*. 2, 56–71.
- Azmi, D. T. (2025). *Political Education as a Catalyst for Adaptive Social Transformation Based on Structural Functional Theory (Durkheim & Parsons)*. 309–318. <https://doi.org/10.64728/sirad.v1i3.art10>.
- Bafadhol, I. (2017). Lembaga Pendidikan Islam Di Indoesia. *Jurnal Edukasi Islam*, 06(11), 59–72.
- Binti Maunah. (2022). PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF STRUKTURAL FUNGSIONAL. *Pendidikan Islam*, 10(2), 14–27. <https://doi.org/10.23887/jjps.v10i2.42277>
- Darwis, I., Nahariah, & Azis, I. (2025). Penerapan Teori Sosiologi Pendidikan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Di Kota Makassar. *Jurnal Al-Qiyam*, 6(1), 257–263.
- Juwita, R., Firman, F., Rusdinal, R., & Aliman, M. (2020). Meta Analisis: Perkembangan Teori Struktural Fungsional dalam Sosiologi Pendidikan. *JURNAL PERSEPEKTIF*, 3(1), 1–8.
- Komalasari, D. (2021). *ANALISIS TEORI STRUKTURAL-FUNGSIONALISME TALCOTT PARSONS PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI DUNIA PENDIDIKAN*.
- Kurniawan, R., Riswan, R., Azis, S. A., & Herdi, H. (2023). *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Filsafat Pendidikan Islam*. 2(2).
- Nikmah, M. (2025). *SCHOOL ANALYSIS IS SYSTEM SOCIAL PERSPECTIVE BY TALCOTT PARSONS*. 2, 24–35.
- Niko, N., & Yulasteriyani. (2020). PEMBANGUNAN MASYARAKAT MISKIN DI PEDESAAN PERSPEKTIF FUNGSIONALISME STRUKTURAL. *Dakwah Jurnal*, 3(02), 213–225. <https://doi.org/10.37680/muharrik.v3i02.476>
- Rahmah, M., Sukino, & Supriyatno, T. (2024). TEORI SOSIAL STRUKTURAL FUNGSIONAL DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM. *TSURAYYA*, 47–61.
- Razak, Z. (2024). *Perkembangan Teori Sosial (Mwnyongsong Era Postmoderinisme)*.

- Sayono. (2024). THE ROLE OF ISLAMIC EDUCATION IN STRENGTHENING SOCIAL HARMONY: AN ANALYSIS OF EMILE DURKHEIM'S STRUCTURAL FUNCTIONALISM THEORY. *Proceeding of International Conference on Education and Sharia, 1*, 143–152. <https://doi.org/10.62097/ices.v124.32>
- Wahyuni, Normuslim, & Bakar, A. (2021). *INTERPRETASI PADA SISTEM SOSIAL PENDIDIKAN ISLAM DAN ANALISIS TEORI STRUKTUR FUNGSIONAL*. 8(Ii), 13–20.
- Wijaya, K. C., & Nasution, K. (2023). Pemahaman Terhadap Struktural Fungsional Dalam Konteks Pendidikan Islam. *Annual International Conference on Education Research, 00(00)*, 1–13. <https://doi.org/10.14421/IJBER.tahun.volumeno>
- Zaidan, M. D., Pratama, A. B. R., Fasya, A. M., Fadhilah, M. H., & Fadhil, A. (2025). PERAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBENTUK SOLIDARITAS SOSIAL: TELAAH TEORI FUNGSIONALISME. *JIPSI Jurnal Pendidikan Dan Sosia, 4(2)*, 147–153.
- Munajah, R., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu, 5(3)*, 1183–1190. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.886>.